

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Indah Dhamayanti Putri  
Jabatan : Bupati Bima

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bima, 2016

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

**Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip. 19631231 198702 1 049

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%
		2 Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (SIBIJAK) dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	1 Sistem
3.	Meningkatnya penyusunan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Peraturan Perundang – undangan yang diselesaikan dan disahkan (Perda, Perbup, Kpts)	700 Perda, Perbup. Kpts
4.	Meningkatnya penanganan dan penyelesaian masalah hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah	1. Persentase kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penanganan	82%
		2. Persentase penyelesaian kasus hukum disidang pengadilan	85%
5.	Meningkatnya pemantauan, evaluasi, pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	1 Jumlah kegiatan Penilaian kinerja Camat, Lurah dan Kades berprestasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kgt
		2 Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kgt
6.	Meningkatnya penanganan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Persentase penyelesaian kasus tanah	100%
		2 Persentase lahan/tanah bersertifikat	100%
7.	Meningkatnya pembinaan dan penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah	1 Persentase SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas sesuai dg kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	70 %
		2 Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dengan baik	90 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
		3 Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dengan baik	90 %
		4 Persentase implementasi hasil Anjab dan ABK	92%
8.	Meningkatnya pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Jumlah Laporan LAKIP	1 Dok Lakip
		2 Peningkatan nilai dan predikat AKIP Nilai dan predikat	B
		3 Persentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%
		4 Persentase SKPD yang menyusun Penetapan Kinerja (PK/Tapkin)	100%
		5 IKU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	1 Dokumen IKU
9.	Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP	85 %
10.	Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah daerah	80 %
		2 Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	50 %
		3 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan dalam Perbup dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 15 SPM	15 Perbup
11.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kegiatan produksi dan distribusi perekonomian	1 Persentase dunia usaha yang berkembang	75%
		2 Tersedianya Sistem Informasi Produksi dan distribusi sektor usaha ekonomi	1 Sistem
12.	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin dalam tahun x	24.209 RTS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
13.	Tersedianya sistem pembinaan keagamaan yang terintegrasi dan optimal	1 Panduan/pedoman tentang sistem pembinaan keagamaan yang disusun	4 Dokumen
		2 Prestasi bidang keagamaan tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional	6 %
		3 Lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	100 %
14.	Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan	1 Rasio sarana dan prasarana pendidikan agama perjumlah penduduk	100 %
		2 Jumlah tenaga pembina dan penyuluh agama	955 Orang
15.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	1 Persentase pembayaran ZIS	100 %
		2 Penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji	355 Orang
		3 Peserta khataman Al Qur'an	1.223 Orang
		4 Pembinaan keagamaan	4 Keg.
16.	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah	1 Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dalam tahun x	90 %
		2 Persentase penyerapan anggaran pembangunan daerah	95 %
		3 Jumlah LKPJ Bupati disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 LKPJ
17.	Meningkatnya pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah	1 Persentase proses pelelangan sesuai usulan SKPD yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal	100 %
		2 Tingkat kegagalan pelaksanaan pelelangan	25 %
18.	Peningkatan kualitas pelayanan tamu-tamu pemerintah secara protokoler	Tingkat kepuasan layanan tamu-tamu pemerintah yang dilakukan oleh petugas	100 %
19.	Meningkatnya perencanaan, pengelolaan dan distribusi barang daerah	1 Persentase pengadaan barang daerah sesuai usulan/kebutuhan unit kerja	100 %
		2 Buku standar satuan harga barang daerah	1 Buku

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 265.000.000,00	
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 1.883.040.000,00	

3.	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah	Rp.	740.000.000,00
4.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp.	345.000.000,00
5.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	19.027.650.000,00
6.	Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya	Rp.	3.911.258.250,00
7.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp.	3.330.000.000,00
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	4.170.894.400,00
9.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp.	10.100.000.000,00
10.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	1.740.000.000,00
11.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	2.799.871.250,00
12.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	30.000.000,00
13.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.340.000.000,00
14.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	150.000.000,00
15.	Program Peningkatan Kualitas Da'i, dan Dewan Hakim/Pelatih	Rp.	60.000.000,00
16.	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah	Rp.	250.000.000,00
17.	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Rp.	428.000.000,00
18.	Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan	Rp.	550.000.000,00
19.	Program Peningkatan sarana dan prasarana untuk TPQ/Ponpes	Rp.	627.520.950,00
11.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp.	375.000.000,00

Bima,

2016

**Bupati Bima,**

**Sekretaris Daerah,**

**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

**Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip. 19631231 198702 1 049

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Indah Dhamayanti Putri  
Jabatan : Bupati Bima

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bima, 2016

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

**Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip. 19631231 198702 1 049

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	96%
		2 Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (SIBIJAK) dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	1 Sistem
3.	Meningkatnya penyusunan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Peraturan Perundang – undangan yang diselesaikan dan disahkan (Perda, Perbup, Kpts)	800 Perda, Perbup. Kpts
4.	Meningkatnya penanganan dan penyelesaian masalah hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah	1. Persentase kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penanganan	84%
		2. Persentase penyelesaian kasus hukum disidang peradilan	86%
5.	Meningkatnya pemantauan, evaluasi, pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	1 Jumlah kegiatan Penilaian kinerja Camat, Lurah dan Kades berprestasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kgt
		2 Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kgt
6.	Meningkatnya penanganan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Persentase penyelesaian kasus tanah	100%
		2 Persentase lahan/tanah bersertifikat	100%
7.	Meningkatnya pembinaan dan penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah	1 Persentase SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas sesuai dg kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	75 %
		2 Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dengan baik	93 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
		3 Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dengan baik	92 %
		4 Persentase implementasi hasil Anjab dan ABK	94%
8.	Meningkatnya pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Jumlah Laporan LAKIP	1 Dok Lakip
		2 Peningkatan nilai dan predikat AKIP Nilai dan predikat	B
		3 Persentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%
		4 Persentase SKPD yang menyusun Penetapan Kinerja (PK/Tapkin)	100%
		5 IKU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	1 Dokumen IKU
9.	Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP	87 %
10.	Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah daerah	82 %
		2 Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	55 %
		3 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan dalam Perbup dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 15 SPM	15 Perbup
11.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kegiatan produksi dan distribusi perekonomian	1 Persentase dunia usaha yang berkembang	78%
		2 Tersedianya Sistem Informasi Produksi dan distribusi sektor usaha ekonomi	1 Sistem
12.	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin dalam tahun x	24.209 RTS



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
13.	Tersedianya sistem pembinaan keagamaan yang terintegrasi dan optimal	1 Panduan/pedoman tentang sistem pembinaan keagamaan yang disusun	4 Dokumen
		2 Prestasi bidang keagamaan tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional	10 %
		3 Lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	100 %
14.	Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan	1 Rasio sarana dan prasarana pendidikan agama perjumlah penduduk	100 %
		2 Jumlah tenaga pembina dan penyuluh agama	955 Orang
15.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	1 Persentase pembayaran ZIS	100 %
		2 Penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji	355 Orang
		3 Peserta khataman Al Qur'an	1.223 Orang
		4 Pembinaan keagamaan	4 Keg.
16.	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah	1 Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dalam tahun x	90 %
		2 Persentase penyerapan anggaran pembangunan daerah	95 %
		3 Jumlah LKPJ Bupati disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 LKPJ
17.	Meningkatnya pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah	1 Persentase proses pelelangan sesuai usulan SKPD yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal	100 %
		2 Tingkat kegagalan pelaksanaan pelelangan	25 %
18.	Peningkatan kualitas pelayanan tamu-tamu pemerintah secara protokoler	Tingkat kepuasan layanan tamu-tamu pemerintah yang dilakukan oleh petugas	100 %
19.	Meningkatnya perencanaan, pengelolaan dan distribusi barang daerah	1 Persentase pengadaan barang daerah sesuai usulan/kebutuhan unit kerja	100 %
		2 Buku standar satuan harga barang daerah	1 Buku

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 265.000.000,00	
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 1.883.040.000,00	

3.	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah	Rp.	740.000.000,00
4.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp.	345.000.000,00
5.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	19.027.650.000,00
6.	Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya	Rp.	3.911.258.250,00
7.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp.	3.330.000.000,00
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	4.170.894.400,00
9.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp.	10.100.000.000,00
10.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	1.740.000.000,00
11.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	2.799.871.250,00
12.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	30.000.000,00
13.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.340.000.000,00
14.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	150.000.000,00
15.	Program Peningkatan Kualitas Da'i, dan Dewan Hakim/Pelatih	Rp.	60.000.000,00
16.	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah	Rp.	250.000.000,00
17.	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Rp.	428.000.000,00
18.	Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan	Rp.	550.000.000,00
19.	Program Peningkatan sarana dan prasarana untuk TPQ/Ponpes	Rp.	627.520.950,00
11.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp.	375.000.000,00

Bima,

2016

**Bupati Bima,**

**Sekretaris Daerah,**

**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

**Drs. H. M. Taufik Hak., M. Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip. 19631231 198702 1 049